

MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020

Inggried Fena Meyliana 1,
Dewi Erowati 2,
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro¹
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro²
cutely_iik@yahoo.com¹
dewi.erowati@live.undip.ac.id²

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Faktor yang mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2015 dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020. Terlebih lagi, mempelajari kesiapan masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2020 di masa pandemi penting dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada narasumber yang berasal dari KPUD Tana Toraja, organisasi semu politik Banteng Muda Indonesia dan Pengamat Politik Tana Toraja. Pengumpulan data skunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media online. Teknik analisis data melalui aktivitas reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi tingkat kesadaran politik dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengantisipasi konflik antar pendukung pasangan calon. Selain itu, Pilkada Tana Toraja Tahun 2020 di masa pandemi diprediksikan mengalami penurunan terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hal itu disebabkan karena masih tingginya jumlah kasus Covid-19 yang terjadi dan pemungutan suara di bulan Desember dimana pada bulan ini juga factor cuaca cenderung tidak mendukung masyarakat dalam melakukan aktifitasnya sehingga dapat menjadi alasan masyarakat untuk tidak hadir di TPS pada hari pemilihan 9 Desember nanti.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

This study examines the political participation of the local people of Tana Toraja Regency elections in 2020. Factors that affect the decline of the participation of Tana Toraja community in elections 2015 can be used as a reference to increase voters participation in elections 2020. Moreover, learning the readiness of Tana Toraja community in the election 2020 in the time of important pandemic. This

research uses qualitative descriptive methods. The technique of data collection through primary data obtained from a thorough interview to the resource originated from KPUD Tana Toraja, the political Semitic organization of Bull Young Indonesia and political observer Tana Toraja. Collection of the secondary data by quoting books, journals, documents, online media. Data analysis techniques through data reduction activities, display data, and draw conclusions. The results showed a decline in the participation of Tana Toraja election year 2015 influenced by the level of political awareness and lack of public confidence in the government in anticipation of conflict between supporters of prospective partners. In addition, the year 2020 election of Tana Toraja in the period of the predicted pandemic experienced a decline in public participation in the use of suffrage. This is due to the high number of cases Covid-19 happened and the vote in December which in this month also the weather factor tends not to support the community in conducting its activities so that it can be the reason society not to be present in the TPS on election Day December 9 later.

Keywords: *Political participation, regional head elections*

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia dikatakan bahwa Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara prosedural (Ginting, 2018). Hadirnya Pemilu memberi harapan baru terhadap keberlangsungan demokrasi rakyat (Kusmanto, 2014). Maka partisipasi masyarakat untuk membatasi para elite dalam menyalagunakan norma dan prosedur demokrasi penting dilakukan (Lussier, 2016). Selain itu, pemerintah pusat menerbitkan UU 10/2016 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Sehingga, partisipasi pemilih dalam kontestasi Pilkada menunjukkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menentukan kebijakan daerah (Nasution, 2019).

Pelaksanaan Pilkada secara langsung masih menjadi diskursus penting, sebab apakah Pilkada berdampak positif atau negatif terhadap pengembangan demokrasi. Menyitir Afan Gaffar menguraikan indikator keberhasilan demokrasi yaitu; *Pertama*, pejabat publik yang dipilih harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya. *Kedua*, rotasi kekuasaan sebagai proses rekrutmen Kepala Daerah harus dilakukan secara berkelanjutan, teratur dan damai. *Ketiga*, rotasi kekuasaan, membutuhkan sistem rekrutmen politik yang terbuka. *Keempat*, rekrutmen jabatan politik harus dilakukan dengan Pemilu dan

dilaksanakan secara teratur, kompetitif, jujur dan adil. *Kelima*, setiap masyarakat harus menikmati hak – hak dasar secara luas seperti, hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan menikmati pers yang bebas (Gaffar, 2006).

Selanjutnya, Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 dengan diikuti 270 daerah yang terbagi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota (Detik.news, 2020). Efek pandemi Covid-19 telah menghambat proses penyelenggaraan Pilkada dan Perppu 2/2020 sebagai regulasi dalam penundaan Pilkada serentak 2020 (Hasibuan, 2020). Regulasi tersebut, memberikan tiga opsi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021. Namun, Gugus tugas Covid-19 melayangkan surat kepada KPU untuk melakukan Pilkada pada 9 Desember dan tindak lanjut Ketua KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah Pandemi (Sadikin, 2020; Metrotvnews.com, 2020). Sementara itu, Kabupaten Tana Toraja menjadi salah satu daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2020 (Wijaya, 2019). Berikut data partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati Tana Toraja dari Tahun 2005-2015:

Tabell.1
Data Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati Tana Toraja

Pilkada	Jumlah Seluruh Pemilih	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2005	267.864	207.830	77,6%
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2010	147.617	116.157	78,7%
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2015	171.687	122.910	71,7%

Sumber ; KPUD Tana Toraja

Pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang berimplikasi terhadap tingkat partisipasi di Pilkada (Salabi, 2020). Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih yang menjadi indikator keberhasilan Pilkada harus diperhatikan. Terlebih lagi, masyarakat Tana Toraja dalam konstestasi Pilkada mengalami penurunan tingkat

partisipasi. Hemat penulis, berdasarkan trend partisipasi pada Pemilihan Bupati Tahun 2005 dengan partisipasi sebesar 77,6%, Pemilihan Bupati Tahun 2010 partisipasi mencapai 78,7% dan Pemilihan Bupati Tahun 2015 partisipasi hanya 71,7% (KPU Tana Toraja, 2019). Walaupun, penurunan tingkat partisipasi tidak signifikan, tetapi hasil Pemilihan Bupati Tahun 2015 dan Pemilihan Bupati yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020, dapat dicermati untuk menakar partisipasi masyarakat Tana Toraja dalam menggunakan hak pilihnya.

Penelitian terdahulu, telah banyak dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yang melakukan analisis terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada. Namun, keterlibatan masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih menjadi persoalan yang tidak kunjung tuntas pada setiap kontestasi Pilkada. Adapun, beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Hasil studi akbar menjelaskan partisipasi rakyat membutuhkan komitmen untuk menjamin setiap warga dapat berpartisipasi secara baik. Selain itu, Pilkada berperan penting terhadap kualitas kepemimpinan lokal dan membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin (Akbar, 2016). Selain itu, Suyatno menjelaskan kemenangan dan kekalahan petahana dalam Pilkada memiliki keterkaitan terhadap partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih (Suyatno, 2016).

Selanjutnya, penelitian Hendrik menunjukkan keterbatasan sosialisasi Pilkada oleh KPU dan rendahnya kesadaran politik warga menjadi variabel dalam mempengaruhi tingkat partisipasi di Pilkada (Hendrik, 2010). Sementara itu, hasil penelitian Panggi menunjukkan penyelenggaraan Pilkada serentak belum efisien, sebab tidak dapat meningkatkan partisipasi politik, menutup celah praktek politik uang dan rekrutmen bakal pasangan calon Kepala Daerah tidak terbuka dan transparan (Chaniago, 2016). Tambahan lagi, tesis Siringoringo memperlihatkan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada serentak tahun 2015 disebabkan lemahnya peran KPU dalam melakukan sosialisasi, pendidikan dan komunikasi politik (Siringoringo, 2016). Penelitian dalam tulisan ini memiliki kebaruan dalam beberapa hal dengan penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis akan menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja pada Pilkada

serentak tahun 2020. Hemat penulis, berkaca pada trend partisipasi pemilih Tana Toraja pada Pilkada 2015 yang menunjukkan partisipasi menurun dan Pilkada 2020 dimasa pandemi telah menghambat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan pemecahan masalah melalui pengamatan manusia berdasarkan gejala – gejalanya (Moleong, 2017). Fokus penelitian ini adalah menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja terhadap Pilkada serentak tahun 2020. Lokus penelitian terdapat pada Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 19 Kecamatan, 47 Kelurahan dan 112 Desa (Sulselprov.go.id, 2019). Teknik pengumpulan data melalui data primer yang didapatkan dari wawancara mendalam kepada narasumber yang berasal dari KPUD Tana Toraja, organisasi semu politik Banteng Muda Indonesia dan Pengamat Politik Tana Toraja. Selain itu, pengumpulan data skunder dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media online, serta bahan lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut meliputi: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

PEMBAHASAN

Menakar partisipasi politik masyarakat Tana Toraja di Pilkada tahun 2020 bukan sesuatu yang mudah. Sebab, masyarakat dalam menggunakan hak pilih tentu dipengaruhi beberapa faktor. Namun berbagai perilaku politik dan peristiwa kontestasi Pilkada dapat dicermati untuk melahirkan sebuah analisa. Menyitir Ramlan Surbakti menguraikan faktor – faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan. Pendapat tersebut, menegaskan bahwa seseorang dengan kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung tidak aktif (Surbakti, 2010).

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tana Toraja Tahun 2015

Kapupaten Tana Toraja sudah melaksanakan Pemilihan Bupati sebanyak 3 kali yaitu pada Pilkada 2005 dengan partisipasi mencapai 77,6%, Pilkada 2010 partisipasi sebesar 78,7% dan Pilkada 2015 partisipasi hanya 71,7%. Hasil rekapitulasi tersebut, menunjukkan partisipasi pada Pemilihan Bupati Tana Toraja tahun 2015 cukup baik, walau terjadinya penurunan dalam rentang waktu 3 periode penyelenggaraan Pemilihan Bupati. Hemat penulis, senada dengan pernyataan dari Isak Pareang selaku Sekretaris KPUD Tana Toraja yang mengatakan: *“Partisipasi pemilihan Bupati Tana Toraja Tahun 2015 Cukup baik dengan 71,7%. Namun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin partisipasi kaum perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Yaitu 72,7% untuk perempuan dan 70,5% untuk laki-laki”*.

Kesadaran politik menjadi prasarat utama dalam meningkatkan partisipasi politik, sebab masyarakat yang memiliki kesadaran politik tentu memahami hak dan kewajibannya pada kegiatan Pilkada (Nasution, 2019). Akan tetapi, penurunan tingkat partisipasi pada Pemilihan Bupati Tana Toraja pada Tahun 2015 memiliki keterkaitan dengan kesadaran politik masyarakat. Kondisi tersebut, sangat dipengaruhi peran penyelenggara dalam melakukan pendidikan politik, sosialisasi politik dan rekam jejak calon Kepala Daerah. Hemat penulis, didukung pernyataan dari Frans Bore selaku Sekretaris BMI DPC Tana Toraja (Banteng Muda Indonesia) yang mengatakan : *“Partisipasi pada Pilkada 2015 cukup baik dengan 71%, jika dibandingkan dengan Pilkada 2010 terjadi penurunan partisipasi. Faktor masyarakat tidak menggunakan hak pilih disebabkan sikap apatis, pengetahuan tentang politik yang tabu serta kurangnya kredibilitas calon. Sehingga, kesadaran politik masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sangat mempengaruhi tingkat partisipasi di Pilkada Tana Toraja Tahun 2015”*.

Meski tingkat partisipasi pada Pilkada 2015 mencapai 71,7%, masyarakat Tana Toraja masih kesulitan memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan politik. Terlebih lagi, pernyataan dari Avelino Agustinus selaku pengamat politik Tana Toraja dan wartawan senior yang mengatakan : *“Sebagian besar pemilih di Tana Toraja mengikuti pemilu bukan karena mereka mengerti hak dan kewajiban*

demokrasi serta bernegara. Banyak hal yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam memilih, karena keluarga, agama, kedudukan sosial dalam masyarakat, pengaruh tim kampanye (timses), dan ikut-ikutan saja. Sebagian kecil saja yang mengikuti proses Pilkada karena dia mengerti hak demokrasinya dan kewajiban dia sebagai warga negara”.

Selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sering kali mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada. Stereotipe masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah dari pembuatan kebijakan dan mengimplementasikan program, akan memberikan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, calon Kepala daerah yang memiliki rekam jejak dan mengaktualisasikan janji kampanye, sangat mempengaruhi masyarakat berpartisipasi di Pilkada. Sementara itu, partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2015 sarat dengan minimnya kualitas calon, kampanye dan calon Kepala Daerah terbatas. Hemat penulis, sesuai dengan penjelasan dari Frans Bore selaku Sekretaris BMI DPC Tana Toraja (Banteng Muda Indonesia) yang mengatakan: *“Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat diantaranya Kualitas calon yang sangat rendah, kampanye partai dan calon sangat terbatas, pemilih kurang mengenal calon dan sosialisasi penyelenggara ditingkat desa yang terisolir tidak efektif”.*

Menelisik Pemilihan Bupati Tana Toraja Tahun 2010 memiliki dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati Tana Toraja Tahun 2015. Kondisi ini, disebabkan Pilkada 2010 diwarnai kerusuhan dan merengut korban jiwa. Sehingga masyarakat cemas yang dipengaruhi kurangnya jaminan keamanan dalam menggunakan hak pilih di Pilkada Tana Toraja (Indra, 2010). Oleh sebab itu, pada Pilkada 2015 beberapa masyarakat tidak hadir di TPS disebabkan oleh perasaan trauma terhadap kerusuhan pada Pilkada 2010. Pendapat tersebut, senada dengan pernyataan dari Avelino Agustinus selaku Pengamat Politik Tana Toraja dan wartawan senior yang mengatakan: *“Partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja tahun 2015 tidak rendah. Angka 71 persen itu masih cukup baik dibanding daerah lain. Tapi prosentase ini menurut saya masih bisa ditingkatkan, sayangnya masyarakat*

mungkin masih dipengaruhi oleh peristiwa kerusuhan Pilkada tahun 2010. Sebagian pemilih kelihatan masih trauma dengan kejadian itu, sehingga partisipasi pemilih hanya 71 persen. Mestinya meningkat dari Pilkada ke Pilkada selanjutnya”.

Konflik pada Pilkada 2010 dipicu keputusan DPRD Tana Toraja yang membatalkan hasil Pemilihan. Oleh sebab itu, reaksi salah satu pendukung calon melakukan kerusuhan dan mengakibatkan korban jiwa, serta anggota KPUD Tana Toraja diungsikan. Pendapat senada dengan pernyataan Avelino Agustinus selaku Pengamat Politik Tana Toraja dan wartawan senior mengatakan : *“Waktu itu, ribuan orang, yang diduga merupakan pendukung pasangan calon yang kalah melakukan kerusuhan, hal itu dikarenakan DPRD Tana Toraja membuat keputusan politik kontroversial dengan membatalkan hasil Pilkada. Oleh sebab itu, Keputusan dari DPRD Tana Toraja dalam rapat paripurna khusus yang tidak menerima hasil Pilkada dan membatalkan hasil pilkada ini menyebabkan bentrokan massa yang terjadi di Makale selama tiga hari menyebabkan satu orang warga meninggal, belasan luka2 serta anggota KPU Tana Toraja yang kala itu juga diungsikan.”*

Kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Penurunan partisipasi Pemilihan Bupati Tana Toraja pada Tahun 2015 disebabkan tingkat kesadaran politik masyarakat yang belum mampu memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan hak pilih. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pilkada dalam menjamin setiap individu untuk memilih, masih menjadi faktor yang menghambat peningkatan partisipasi di Kabupaten Tana Toraja. Oleh sebab itu, Pilkada serentak Tahun 2020 yang akan datang harus menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk melindungi kuantitas dan kualitas dari partisipasi pemilih. Sehingga, indikator keberhasilan Pilkada tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi mengedukasi masyarakat dalam mengambil peran dalam seluruh kegiatan Pilkada.

Kesiapan Penyelenggara dan Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Tana Toraja

KPU RI telah mengkonfirmasi bahwa Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember dengan protokol Covid-19 (Metrotvnews.com, 2020). Akan tetapi, Perludem membuat petisi untuk penundaan Pilkada ke 2021, sebab Pilkada 9 Desember 2020 tidak realistis dan mengancam partisipasi masyarakat (Sadikin, 2020b). Sementara itu, Ketua KPU RI Arif Budiman berharap Partisipasi masyarakat tetap tinggi meski Pilkada serentak 2020 dilakukan di masa Pandemi (Nugraheny, 2020). Dengan demikian, Kabupaten Tana Toraja menjadi salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi. Kesiapan KPUD Tana Toraja tentu menjadi hal yang utama, sebab penyelenggara Pilkada menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan rakyat. Kesiapan KPUD Tana Toraja merujuk pernyataan dari Isak Pareang selaku Sekretaris KPUD Tana Toraja yang mengatakan: *“Kesiapannya ngeri-ngeris sedap, dikarenakan wabah covid-19 masih trus menghantui kehidupan masyarakat saat ini, kesiapan KPU Kabupaten di daerah tentunya siap melaksanakan kebijakan KPU RI. Jika Pilkada nanti dilaksanakan di 9 Desember 2020, maka KPU Kabupaten harus berbenah dan segera menerapkan konsep new normal, dan segera mempersiapkan kebutuhan alat pelindung diri dalam melaksanakan tugas nantinya, kita tidak ingin KPU nantinya dianggap sumber penyebab penularan covid-19 ini, makanya kami telah melakukan koordinasi dengan Ketua Gugus Tugas pencegahan penularan covid di Tana Toraja dan Kepala Dinas Kesehatan Tana Toraja untuk turut mengawal KPU Kabupaten dalam pelaksanaan Tahapan Pilkada di tengah Pandemi ini”*.

KPUD Tana Toraja akan berkordinasi dengan Gugus Tugas Covid dan melakukan protokol Covid-19, sebagai bentuk kesiapan untuk menggelar Pilkada 2020 di tengah Pandemi. Selain itu, kesiapan masyarakat menjadi hal utama dalam ikut serta pada Pilkada serentak 2020. Akan tetapi, Gugus Tugas Covid telah mengkonfirmasi pada 6 Juni 2020 terjadinya penambahan 994 kasus, sehingga jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 30.514 jiwa. Oleh sebab itu, Pilkada Tana Toraja Tahun 2020 di masa pandemi, akan berdampak

terhadap penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Hemat penulis, berdasarkan berbagai pendapat pemerhati pemilu yang mengasumsikan masyarakat takut untuk datang Ke TPS dipengaruhi jumlah kasus Covid-19 belum melandai. Hal senada dengan pernyataan dari Isak Pareang selaku Sekretaris KPUD Tana Toraja yang mengatakan : *“Untuk kesiapan masyarakat sendiri secara keseluruhan kita belum tahu, karena belum ada suvei tentang itu, tapi yang pasti dengan kondisi pandemi saat ini sudah barang tentu akan mengurangi partisipasi pemilih nantinya jika pada 9 desember nanti wabah ini masih trus ada, oleh karena masyarakat akan takut datang ke TPS”*.

Pilkada Tana Toraja Tahun 2020 diprediksikan mengalami penurunan angka partisipasi dari Pilkada 2015. Kondisi tersebut, disebabkan belum adanya yang dapat memastikan kapan Pandemi ini berakhir. Sehingga, masyarakat kehilangan antusias untuk datang ke TPS dan memilih untuk menjaga kesehatannya. Pendapat lainnya, merujuk pernyataan dari Avelino Agustinus selaku Pengamat Politik Tana Toraja dan wartawan senior yang mengatakan : *“Saat ini, secara psikologi, masyarakat kebingungan, takut, dan stres. Karena informasi yang bertubi-tubi soal Covid-19 membuat aktivitas masyarakat terhambat. Saya kira ini akan berdampak besar pada partisipasi pemilih, jika Pilkada diselenggarakan tahun ini. Rasa takut dan khawatir terhadap Covid-19, yang beritanya begitu menggemparkan, akan membuat masyarakat takut ke TPS. Menurut saya, sebagian besar masyarakat tidak siap”*.

Sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkesinambungan dalam melahirkan kebijakan yang diterima masyarakat. Oleh sebab itu, sistem politik, akan berjalan apabila *input* dan *ouput* dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2020 di Tana Toraja, harus ada regulasi yang tepat untuk mengedepankan aspirasi masyarakat. Sehingga, masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya terbebas dari ancaman Covid-19. Dengan demikian, para penyelenggara Pemilu, Pemerhati Pemilu, Partai Politik dan Organisasi sosial, berkerjasama dalam menjadi kedaulatan masyarakat di Pilkada 2020 Tana Toraja.

Secara Topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi dan pada bulan oktober sampai Maret mengalami musim hujan. Kondisi tersebut, mengakibatkan masyarakat tidak aktif untuk menggunakan hak pilih (Sulselprov.go.id, 2019). Terlebih lagi, hasil penelitian Rina Menunjukkan faktor cuaca sangat mempengaruhi masyarakat untuk datang ke TPS (Olii, 2018). Oleh sebab itu, pelaksanaan Pilkada Tana Toraja 2020 diprediksi akan mengalami penurunan partisipasi, sebab masyarakat tidak memilih dipengaruhi pada 9 Desember terjadinya hujan pada saat pemungutan suara. Hal senada disampaikan oleh Frans Bore selaku Sekretaris BMI DPC Tana Toraja (Banteng Muda Indonesia) yang mengatakan: *“Melihat Kabupaten Tana Toraja sebagai dataran tinggi dan di bulan Desember adanya musim hujan, tentu sangat mempengaruhi masyarakat untuk tidak hadir ke TPS pada Pilkada 2020, seperti saya lihat juga di Pilkada 2015 pada saat pemilihan terjadinya hujan, beberapa masyarakat enggan untuk memilih dan hanya berdiam diri dirumah”*.

Pilkada Tana Toraja pada Desember 2020 diprediksi saat pemungutan suara akan diguyur hujan. Hasil wawancara dan penelitian sebelumnya menunjukkan salah satu faktor rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi cuaca saat pemilihan. KPUD Tana Toraja harus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tana Toraja pada Pilkada 2020. Oleh karena itu, penyelenggara mempersiapkan strategi yang sesuai dengan keadaan geografis dan karakteristik masyarakat. Sehingga nantinya dapat terwujud sinergitas antara KPU dengan masyarakat sekitarnya dalam mensukseskan Pilkada 2020.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada Tana Toraja Tahun 2015 dipengaruhi kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya pada kegiatan Pilkada, sebab memilih hanya menggunakan hak pilih berdasarkan faktor keluarga, agama dan kedudukan sosial. Lebih lanjut, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah disebabkan penanganan buruk terhadap kerusuhan di Pilkada 2010 dan mengakibatkan beberapa masyarakat trauma untuk

menggunakan hak pilih. Prediksi partisipasi Pilkada Tana Toraja tahun 2020, akan mengalami penurunan partisipasi, karena masyarakat takut untuk hadir ke TPS dan memilih untuk menjaga kesehatannya. Selain itu, penurunan partisipasi dapat disebabkan faktor cuaca, melihat Pilkada 2020 di Kabupaten Tana Toraja saat pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2016). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. *Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95–110. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196–211. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- Detik.news. (2020). Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020. *Detik News*, p. 1. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia, transisi menuju demokrasi* (VI). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, F. P. . (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliametary Treshlod. *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 79–90. <https://doi.org/10.32734/politeia.v10i2.630>
- Harismanto. (2010). Korban Kerusakan Pilkada Tana Toraja Akhirnya Tewas. *Tribunnews.Com*, p. 1. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/regional/2010/06/24/korban-kerusakan-pilkada-tana-toraja-akhirnya-tewas>
- Hasibuan, R. P. P. . (2020). Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19. *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 121–128. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15503>
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahannya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9, 137–148. Retrieved from <http://ejournal.fip.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1421%5Cnhttp://download.portalgaruda.org/article.php?article=101259&val=1511>
- Indra. (2010). Kapolres Tana Toraja Dinilai Lamban Tangani Rusuh Pilkada. *Koran.Tempo.Co*, p. 1. Retrieved from

<https://koran.tempco.co/read/makassar/207552/kapolres-tana-toraja-dinilai-lamban-tangani-rusuh-pilkada?>

KPUD Tana Toraja. (2019). *Tingkat Partisipasi Pemilihan Bupati Kabupaten Tana Toraja*. Tana Toraja. Retrieved from <https://kpu-tanatorajakab.go.id/#>

Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 78–90. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>

Lussier, D. N. (2016). *Constraining Elites in Rusia and Indonesia (Political Participation and Regime Survival)* (First). New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/slr.2019.104>

Metrotvnews.com. (2020). Nasib Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Indonesia: Metrotvnews.com. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCqDIm-nasib-pilkada-serentak-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>

Miles, M. B., Huberman, M. & S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (H. Salmon, Ed.) (3rd ed.). London: SAGE.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (27th ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, F. A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 7(2), 227–235. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/3015/2302>

Nugraheny, D. E. (2020). Pilkada Saat Pandemi, Ketua KPU Berharap Partisipasi Masyarakat Tetap Tinggi. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/13240971/pilkada-saat-pandemi-ketua-kpu-berharap-partisipasi-masyarakat-tetap-tinggi>

Olii, R. R. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Pada Pilkada Kota Palu Tahun 2015. *JURNAL EDU CIVIC MEDIA PUBLIKASI PRODI PPKN*, 6(1), 42–52. Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/EduCivic/article/view/11201/8650>

Sadikin, U. H. (2020a). Gugus Tugas Covid-19 Minta KPU Laksanakan Pungut Hitung Pilkada Desember 2020. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/gugus-tugas-covid-19-minta-kpu-laksanakan-pungut-hitung-pilkada-desember-2020/>

- Sadikin, U. H. (2020b). Pegiat Pemilu Buat Petisi “Tunda Pilkada ke 2021.” Retrieved from <https://rumahpemilu.org/pegiat-pemilu-buat-petisi-tunda-pilkada-ke-2021/>
- Salabi, A. (2020). Menakar Kesiapan Pilkada di Tengah Pandemi. Retrieved from <https://rumahpemilu.org/menakar-kesiapan-pilkada-di-tengah-pandemi/>
- Siringoringo, F. P. (2016). *Lemahnya Upaya KPU Kota Medan Dalam Meminimalisir Rendahnya Partisipasi Politik Pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015*. Universitas Negeri Medan.
- Sulselprov.go.id. (2019). Deskripsi Daerah Kabupaten Tana Toraja. Retrieved June 1, 2020, from https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/19
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. (F. A. Herfan Djoni, Ed.) (VII). Jakarta: PT Grasindo.
- Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 212–230. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>
- Wijaya, H. (2019). Pilkada Serentak 2020 di Sulsel Diikuti 12 Daerah. Retrieved June 2, 2020, from <https://www.sulselsatu.com/2019/06/14/nasional/pilkada-serentak-2020-di-sulsel-diikuti-12-daerah.html>